

Ridho dan Gelombang Pemilukada I

Hertanto

Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

JELANG pemilukada di delapan kabupaten dan kota di Lampung tahun depan (2015), banyak calon yang sudah bermunculan. Ada wajah-wajah baru dan banyak wajah lama, ada yang akan berkendaraan parpol dan ada yang berikrar mandiri sebagai calon perorangan. Semuanya tampak sangat serius, tidak main-main, bukan ala kadarnya, atau sekadar ingin jadi penggembira belaka. Ini tentu patut dihargai, semakin banyak calon semakin banyak alternatif bagi para pemilih.

Bukan cuma para calon, para pengamat pun sudah mulai menebarkan analisis, ramalan, dan prediksi yang menjelaskan tentang berbagai kemungkinan, peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan. Dengan itu, disimpulkan bahwa setiap calon harus punya modal sosial, ekonomi, dan politik. Kesimpulan seperti ini pun pernah dikemukakan oleh artis politikus Nurul Arifin dalam suatu diskusi di Sheraton, Bandar Lampung, beberapa tahun yang lalu. Katanya, itu salah satu kesimpulan dari tesis magisternya. Singkatnya, kalau mau memenangi pemilukada milikilah tiga modal tersebut.

Entahlah, apakah tesis itu masih muarab saat ini atau sudah mulai luntur mengingat fenomena berbagai hasil pemilukada akhir-akhir ini dan paling mutakhir fenomena Pemilihan Presiden Indonesia 2014. Mungkin tesis ini akan semakin teruji manakala proses dan tahapan pemilukada di delapan kabupaten dan kota di Lampung tahun depan (2015) sudah mulai bergerak.

Lebih menarik lagi bahwa pemilukada di Lampung tahun 2015 adalah gelombang pertama pemilukada di bawah kepemimpinan Gubernur M. Ridho Ficardo. Pertanyaannya, sarana apa yang mesti disiapkan Gubernur Lampung agar demokrasi lokal pemilukada semakin kukuh?

Kondusivitas Politik Lokal

Gubernur Ridho mesti memprioritaskan suasana sosial dan politik yang kondusif agar pemilukada tahun depan pun ber-

langsung secara kondusif di kota dan kabupaten. Suasana kondusif penting untuk mengiringi persaingan sengit antarcalon, partai, dan pendukungnya agar tidak panas dan tak terkendali sehingga berujung kepada konflik sosial yang besar. Suasana kondusif pun penting untuk menghindari ketegangan laten masyarakat yang semakin anti terhadap pemilukada langsung.

Untuk itu, Gubernur Ridho perlu menghindari pendekatan konflik dalam berbagai interaksi dan proses politik di dalam maupun di luar pemerintahannya. Terutama dengan DPRD sebagai sesama unsur penting pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai mitra dalam membuat kebijakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pengalaman di beberapa daerah yang sudah mulai menerapkan "lelang jabatan" bisa mulai dipertimbangkan. Bukan hanya untuk mendapatkan pejabat yang mumpuni berkualitas, melainkan juga untuk mengurangi kesan "like and dislike" atas dasar nepotisme dan primordialisme.

Begitu juga interaksi dengan pihak-pihak di luar pemerintahan, Gubernur Ridho bisa mengambil pelajaran dari konflik "abadi" Gubernur Sjachroedin dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung dan dengan tokoh-tokoh politik tertentu, hampir sepanjang masa pemerintahannya. Sadar atau tidak, besar atau kecil, konflik semacam itu memicu ketegangan pula dalam masyarakat. Ketegangan ini pasti memengaruhi kondusivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan di Lampung secara keseluruhan.

Oleh karena itu, sekalipun klise, sebagai pejabat politik tertinggi di Lampung, Gubernur Ridho mesti memprioritaskan penggunaan mekanisme negosiasi dan kompromi secara bijak dalam setiap interaksi sosial dan politiknya. Gesekan, ketersinggungan, dan salah paham pasti akan terjadi sepanjang pemerintahannya nanti. Risiko itu pasti akan ditemui oleh siapa pun, tetapi sebagai pejabat publik dan pejabat negara Gubernur mesti mesti menyikapinya secara arif.

Politisasi Birokrasi

Fenomena mengarahkan aparatur sipil negara untuk kepentingan politik kepala daerah ini hampir merata di semua daerah pada setiap pemilukada. Salah

satu akibatnya adalah pemerintahan yang tidak efektif karena terjadinya klik-klik yang rentan konflik internal.

Ada banyak gubernur yang sekaligus ketua DPD parpol atau aktivis kader parpol sehingga sering tidak mampu memisahkan antara tindakan formal sebagai gubernur dan pimpinan/kader parpol. Bahkan sering secara sengaja dicampuradukkan untuk memaksimalkan kepentingan parpol/kelompoknya, terutama menjelang pemilukada di daerahnya. Misalnya, saat ini sudah mulai berkembang gosip bahwa Gubernur Ridho sudah mulai menyiapkan "orang-orang dekatnya" untuk dipertandingkan pada delapan pemilukada tahun 2015. Sebenarnya, tidak/belum ada undang-undang yang melarang tindakan itu bagi seorang kepala daerah, apalagi dia menyandang sebagai pimpinan parpol yang punya kewajiban memperjuangkan kader-kader parpolnya.

Namun, beberapa kasus yang berkembang di beberapa pemilukada sering gubernur sengaja mengarahkan program dan anggaran daerah untuk menyokong kemenangan calon-calon tertentu di pemilukada kabupaten dan kota. Untuk menguatkan beroperasinya kepentingan politiknya itu, kemudian "ditugaskan" kepala-kepala dinas atau lembaga tertentu untuk mengawal dan menjalankannya. Ada kasus seperti ini yang terbongkar oleh MK, tapi ada yang lolos dari jerat hukum formal. Namun, masyarakat tidak buta tuli sehingga mereka pun menilai mana-mana kinerja gubernur yang benar secara tupoksi dan mana yang digerakkan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya.

Dua persoalan di atas merupakan batu ujian pertama bagi Gubernur Ridho dalam menyambut gelombang pertama pemilukada kabupaten/kota di Lampung pada awal pemerintahannya. Banyak harapan masyarakat yang digantungkan kepada gubernur baru untuk meningkatkan kesejahteraan dan demokrasi lokal yang kondusif dan berkualitas. Kemampuan mengelola dua perkara di atas akan menjadi salah satu tabungan bagi track recordnya dalam menapaki karier politiknya yang masih terbentang luas dan panjang untuk menuju peringkat yang lebih tinggi dan cemerlang. ■